

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PANITIA PENGADAAN
BARANG DAN JASA YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH
DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG MASUK
DALAM DAFTAR HITAM**

ABSTRAK

Muthia Andra Andriana

1687035

Didalam suatu negara dibutuhkan suatu infrastruktur untuk memenuhi fasilitas masyarakat, pemerintah berperan sangat penting demi kemakmuran masyarakatnya. Banyaknya penduduk di Indonesia sangat berpengaruh terhadap kebutuhan dan peningkatan ekonomi di masyarakat, termasuk kebutuhan lapak pekerjaan. pemerintah sudah cukup banyak menyediakan berbagai jenis lapangan pekerjaan seperti Pertanian, Kesehatan, Pendidikan, Bangunan dan Jalan yang bersangkutan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dalam penelitian ini untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang merupakan metode penelitian dengan mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pengadaan barang/jasa mengenai pengaturan hukumnya dikaitkan dengan kepastian hukum di Indonesia yang di atur dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 tahun 2018 masih keliru dalam memutus sesuai dengan hukuman yang semestinya. Dalam kasus yang terjadi bahwa satu perusahaan dikenakan sanksi yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam LKPP dan Perpres yang di tetapkan. Tanggung Jawab Panitia Pengadaan Barang dan Jasa memenangkan Perusahaan yang masuk kedalam daftar hitam sudah di atur secara jelas oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan hukuman sanksi administratif, pidana, dan perdata.

Kata kunci: Tanggungjawab Hukum, Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, Daftar Hitam.

***LEGAL RESPONSIBILITY OF THE PROCUREMENT COMMITTEE
OF GOODS AND SERVICES CONDUCTED BY THE GOVERNMENT
AND THE LEGAL CERTAINTY OF THE COMPANY IN THE
BLACKLIST***

ABSTRACT

In a country that needed infrastructure to meet community facilities, the Government played an important role in the prosperity of the community. A large number of population in Indonesia have an impact on the needs and economic improvement in the community, including the need for work. The government is already providing many kinds of field jobs such as agriculture, health, education, buildings, and roads related to the procurement of goods and services.

The type of research used in this study is the normative juridical in this study to discover the truth based on the legal science logic of the normative side. The nature of the research used in this study is an analytical descriptive which is a method of research by collecting files by the actual. The research approach used in this study is a statutory approach and a conceptual approach. The type of data used is secondary, additional data obtained from various legal materials related to this research.

The results of the study concluded that in the procurement of goods/services regarding the legal arrangements associated with legal certainty in Indonesia set out in Presidential Regulation No. 16 of 2018 and the Regulation of the Government Procurement policy institute (LKPP) No. 17 of 2018 is still wrong in breaking following the proper punishment. In the case that one company is subject to sanctions that do not comply with the regulations in lkpp and press set out. The responsibility of the Goods and Services Procurement Committee wins the Blacklisted Company has been set by the Procurement of Goods and Services Policy Institute (LKPP) and Government Regulation No. 53 of 2010 on Civil Servant Discipline with administrative, criminal, and civil sanctions.

Keywords: legal responsibility, procurement of goods/services Government, Blacklist.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG UJIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	23
BAB II PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA	
A. Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa.....	24
B. Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa.....	27
C. Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.....	31
BAB III DAFTAR HITAM PERUSAHAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA	
A. Jenis – Jenis Pengadaan Barang Dan Jasa.....	38
B. Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pengusaha Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	41
C. Sanksi - Sanksi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa.....	47

**BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PANITIA
PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DILAKUKAN OLEH
PEMERINTAH DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN
YANG MASUK DALAM DAFTAR HITAM**

- A. Pengaturan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia Dikaitkan dengan Kepastian Hukum.....50
- B. Tanggung Jawab Hukum Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang Memenangkan Perusahaan Sudah Masuk Kedalam Daftar Hitam.....58

BAB V KESIMPULAN

- A. Kesimpulan.....72
- B. Saran.....73

DAFTAR PUSTAKA.....75

